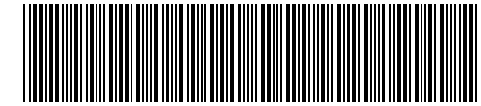




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408839/2022**



DS:3845-9946-0014-5255

Revisi ke 05

Tanggal : 12 April 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
4. Kode>Nama Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK
- Sebesar : Rp. 905.301.000 (SEMBILAN RATUS LIMA JUTA TIGA RATUS SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	905.301.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBPNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 905.301.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2022



DS:3845-9946-0014-5255

Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	147.311.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	147.311.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	757.990.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	757.990.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3845-9946-0014-5255

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			147.311.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			147.311.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	40.058.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	40.058.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	107.253.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	107.253.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			757.990.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			757.990.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat	170.000.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	5,00	Kelompok Masyarakat	127.307.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	42.693.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3845-9946-0014-5255

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		5,00	Lembaga	72.326.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum		5,00	Lembaga	72.326.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BMA	Data dan Informasi Publik		6,00	layanan	99.564.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Fasilitasi JDIHN		5,00	Lembaga	87.564.000
Rincian Output		:	02 BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum		1,00	Layanan	12.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		47,00	Orang	351.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	47,00	Orang/Kasus	351.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		5,00	Kelompok Masyarakat	65.100.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	5,00	Kegiatan	65.100.000

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

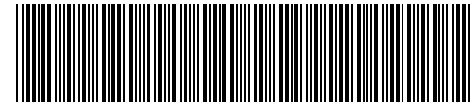
ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2022

I B. SUMBER DANA



DS:3845-9946-0014-5255

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode>Nama Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	905.301.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	905.301.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

Pagu

Ekuivalen Rupiah

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



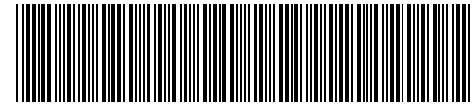
DS:3845-9946-0014-5255

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408839	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	-	905.301	-	-	-	905.301		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	147.311	-	-	-	147.311		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	147.311	-	-	-	147.311		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	40.058	-	-	-	40.058	13 . 51	
01	RM	-	40.058	-	-	-	40.058	042	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	107.253	-	-	-	107.253	13 . 51	
01	RM	-	107.253	-	-	-	107.253	042@	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	757.990	-	-	-	757.990		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	757.990	-	-	-	757.990		
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	170.000	-	-	-	170.000	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3845-9946-0014-5255

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

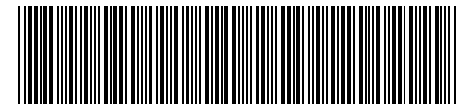
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	170.000	-	-	-	170.000	042@	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	72.326	-	-	-	72.326	13 . 51	
01 RM		-	72.326	-	-	-	72.326	042	
4841.BMA	Data dan Informasi Publik (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	99.564	-	-	-	99.564	13 . 51	
01 RM		-	99.564	-	-	-	99.564	042	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	351.000	-	-	-	351.000	13 . 51	
01 RM		-	351.000	-	-	-	351.000	042@	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	65.100	-	-	-	65.100	13 . 51	
01 RM		-	65.100	-	-	-	65.100	042@	
JUMLAH		-	905.301	-	-	-	905.301		

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3845-9946-0014-5255

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

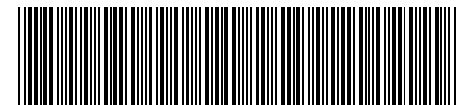
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408839	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	13.503	98.153	161.522	97.356	89.092	89.092	89.092	89.092	89.092	89.308	905.301
		BELANJA BARANG	0	0	13.503	98.153	161.522	97.356	89.092	89.092	89.092	89.092	89.092	89.308	905.301
013.10.BB.5256		Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	0	0	25.153	23.880	48.118	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	147.311
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	25.153	23.880	48.118	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	147.311
013.10.BF.4841		Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	0	13.503	73.000	137.642	49.238	80.732	80.732	80.732	80.732	80.732	80.948	757.990
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	13.503	73.000	137.642	49.238	80.732	80.732	80.732	80.732	80.732	80.948	757.990

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2022
IV A. B L O K I R**



DS:3845-9946-0014-5255

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [408839] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
408839	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK		Automatic Adjustment
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 231.456		Disposisi: Automatic Adjustment
	52 Belanja Barang Rp. 231.456	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.750
5256.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga		Automatic Adjustment
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.244		
	Automatic adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah		
4841.BDD	Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.150		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.072		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.240		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 141.000		

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:3845-9946-0014-5255

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [408839] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001